



**PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN**

**KUA** TA. 2022

**KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN  
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2022**







**NOTA KESEPAKATAN  
ANTARA  
PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN  
DENGAN  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BALIKPAPAN  
NOMOR : 170/O6-31.1 /DPRD  
NOMOR : 903/ 1185 /BPKD  
TANGGAL : 27 Agustus 2021**

**TENTANG  
KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2022**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : RAHMAD MAS'UD  
Jabatan : Wali Kota Balikpapan  
Alamat Kantor : Jalan Jenderal Sudirman No.1 Balikpapan  
Bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Kota Balikpapan
  
2. a. Nama : ABDULLOH  
Jabatan : Ketua DPRD Kota Balikpapan  
Alamat Kantor : Jalan Jenderal Sudirman Balikpapan
- b. Nama : BUDIONO  
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kota Balikpapan  
Alamat Kantor : Jalan Jenderal Sudirman Balikpapan
- c. Nama : SABARUDDIN PANRECALLE  
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kota Balikpapan  
Alamat Kantor : Jalan Jenderal Sudirman Balikpapan
- d. Nama : SUBARI  
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kota Balikpapan  
Alamat Kantor : Jalan Jenderal Sudirman Balikpapan  
Bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Balikpapan.

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) diperlukan Kebijakan Umum APBD yang disepakati Bersama antara DPRD dengan Pemerintah Daerah untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD TA 2022.



Berdasarkan hal tersebut di atas, dan mengacu pada kesepakatan antara DPRD dan Pemerintah Daerah tentang Kebijakan Umum APBD TA 2022, para pihak sepakat terhadap Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang meliputi rencana Pendapatan dan Penerimaan Pembiayaan Daerah TA 2022, Prioritas Belanja Daerah, Plafon Anggaran Sementara berdasarkan urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan, dan rencana Pembiayaan Daerah TA 2022.

Secara lengkap Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2022 disusun dalam Lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

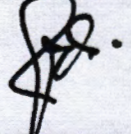
Demikianlah Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2022.

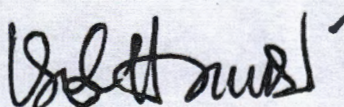
Balikpapan, 27 Agustus 2021

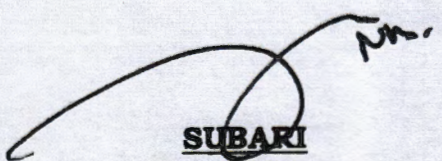
**WALI KOTA BALIKPAPAN**

  
selaku,  
**PIHAK PERTAMA**  
  
**RAHMAD MAS'UD**

  
**PIMPINAN  
DPRD KOTA BALIKPAPAN**  
Selaku,  
**PIHAK KEDUA**  
  
**ABDULLOH**  
Ketua

  
**BUDIONO**  
Wakil Ketua

  
**SABARUDDIN PANRECALLE**  
Wakil Ketua

  
**SUBARI**  
Wakil Ketua



**KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
KOTA BALIKPAPAN TAHUN ANGGARAN 2022**

**DAFTAR ISI**

<b>PENDAHULUAN</b> -----	<b>1</b>
1.1.LATAR BELAKANG-----	1
1.2.TUJUAN -----	2
1.3.DASAR HUKUM -----	2
<b>KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH DAN KERANGKA PENDANAAN</b> -----	<b>4</b>
2.1. KINERJA MAKRO EKONOMI -----	4
2.1.1. Pertumbuhan Ekonomi-----	4
2.1.2. Inflasi -----	4
2.1.3. Produk Domestik Regional Bruto-----	5
2.2. PROYEKSI KERANGKA PENDANAAN -----	8
2.2.1. Pendapatan Asli Daerah -----	8
2.2.2. Pendapatan Transfer -----	9
2.2.3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah -----	10
2.3 SINKRONISASI KEBIJAKAN PEMBANGUNAN TAHUN 2022 -----	11
2.3.1. Arah Kebijakan Pembangunan Nasional Tahun 2022-----	11
2.3.2. Arah Kebijakan Pembangunan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022 -----	13
2.3.3. Arah Kebijakan Pembangunan Kota Balikpapan Tahun 2022 -----	17
<b>KEBIJAKAN PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN DAERAH</b> -----	<b>26</b>
3.1. PENDAPATAN DAERAH -----	26
3.2. BELANJA DAERAH-----	27
3.3. PEMBIAYAAN DAERAH-----	29
<b>PENUTUP</b> -----	<b>29</b>

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1. Latar Belakang

Pelaksanaan pembangunan daerah dengan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki, bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat baik dalam aspek peluang usaha, kenaikan pendapatan, kesempatan kerja, akses terhadap pengambil kebijakan, berdaya saing dan meningkatkan indeks pembangunan manusia. Pembangunan daerah yang baik didasarkan pada perencanaan yang bertumpu pada prioritas pembangunan berbasis inspirasi masyarakat.

Sesuai dengan amanat Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir kalinya dengan Undang - Undang Nomor 9 tahun 2015, maka rencana pembangunan yang akan dianggarkan dalam APBD terlebih dahulu dibahas dan disepakati antara Pemerintah Daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam bentuk Nota Kesepakatan tentang Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Kebijakan Umum APBD (KUA) adalah dokumen yang memuat kebijakan pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.

KUA Kota Balikpapan Tahun 2022 disusun dengan berdasarkan pada Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Balikpapan Tahun 2022 sebagaimana tertuang dalam Peraturan Wali Kota Balikpapan Nomor 20 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kota Balikpapan Tahun 2022. RKPD Kota Balikpapan Tahun 2022 disusun melalui beberapa pendekatan perencanaan yaitu teknokratis, partisipatif, politis, atas bawah dan bawah-atas (topdown/bottom up) melalui proses Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Malang. RKPD disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan.

Penyusunan KUA serta PPAS pada dasarnya merupakan bagian pentahapan dalam upaya mewujudkan target-target yang telah ditetapkan dalam RKPD Kota Balikpapan, dalam hal ini RKPD Tahun 2022. Selanjutnya KUA ini akan menjadi pedoman dalam penyepakatan PPAS sebelum nantinya menjadi dasar dalam penyusunan RAPBD Kota Balikpapan Tahun 2022.

Dokumen KUA yang disusun memuat kondisi ekonomi makro daerah, asumsi penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), kebijakan pendapatan daerah, kebijakan belanja daerah, kebijakan pembiayaan daerah, dan strategi pencapaiannya. Dengan demikian, maka KUA tahun anggaran 2022 pada dasarnya memuat kebijakan umum daerah tahun 2022 yang menjadi pedoman dan ketentuan umum dalam penyusunan RAPBD tahun anggaran 2022. Kebijakan umum ini diharapkan dapat menjembatani antara arah dan tujuan strategis dengan ketersediaan anggaran.

Kebijakan belanja yang tertuang dalam KUA Kota Balikpapan Tahun Anggaran 2022, dipengaruhi oleh asumsi pertumbuhan ekonomi di Kota Balikpapan pada tahun 2022, baik secara langsung maupun tidak langsung, akan berpengaruh terhadap proporsi pemenuhan kebutuhan pembangunan masyarakat dan pemerintah, pendapatan pemerintah, yang akumulasinya berdampak terhadap pembangunan kota secara keseluruhan. KUA TA 2022 ini menjadi dasar dalam penyusunan PPAS APBD Kota Balikpapan TA 2022 dan penyusunan APBD Kota Balikpapan Tahun Anggaran 2022.

## **1.2. Tujuan**

Tujuan disusunnya KUA TA 2022 adalah untuk menghasilkan kesepakatan bersama antara Pemerintah Kota Balikpapan dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Balikpapan atas kebijakan pembangunan dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kota Balikpapan dalam periode tahun 2022.

Kebijakan pembangunan tersebut meliputi kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya sebagai landasan penyusunan PPAS serta RAPBD TA 2022.

## **1.3. Dasar Hukum**

Penyusunan KUA Tahun 2022 ini didasarkan pada peraturan perundangan yang terkait dibidang perencanaan dan keuangan, yang secara umum sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan RKPD 2022;
12. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 12 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Balikpapan Tahun 2012 – 2032;
13. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 1 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Balikpapan tahun 2005 – 2025.

## BAB II

### KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH DAN KERANGKA PENDANAAN

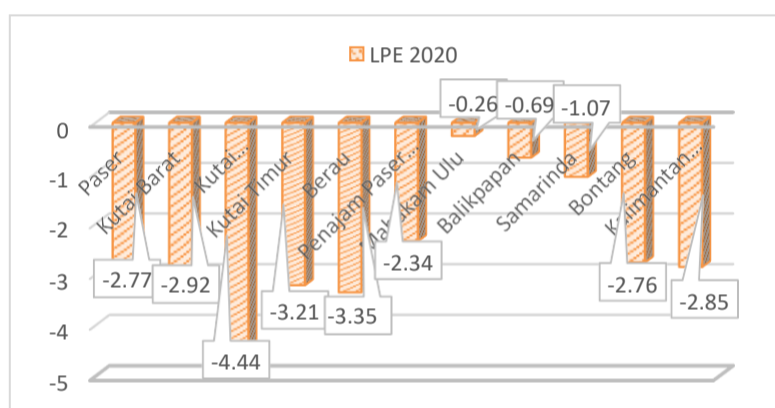
#### 2.1. Kinerja Makro Ekonomi

##### 2.1.1. Pertumbuhan Ekonomi

Berdasarkan PDRB harga konstan 2010, nilai PDRB Kota Balikpapan pada tahun 2020 mengalami kontraksi sebesar minus 0,69 persen. Hal tersebut dipengaruhi oleh meningkatnya produksi di seluruh lapangan usaha yang sudah bebas dari pengaruh inflasi. Akan tetapi jika dibandingkan tahun 2018, angka ini mengalami perlambatan. Hal ini disebabkan karena adanya perlambatan di sektor dominan seperti Transportasi dan Pergudangan serta Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor. Pertumbuhan ekonomi Kota Balikpapan mengalami fluktuasi angka.

Gambar 2.1.

**Pertumbuhan Ekonomi Kota Balikpapan**



Berdasarkan penjelasan diatas, berikut ini tergambar Pertumbuhan Ekonomi (LPE) di Kota Balikpapan pada tahun 2017-2020 sebagai berikut:

**Tabel 1. Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Kota Balikpapan Menurut Lapangan Usaha Tahun 2017-2020**

Uraian	2017	2018	2019	2020
Laju Pertumbuhan Ekonomi	3,84	4,97	4,85	-0.69

Sumber : BPS, Balikpapan Dalam Angka Tahun 2021

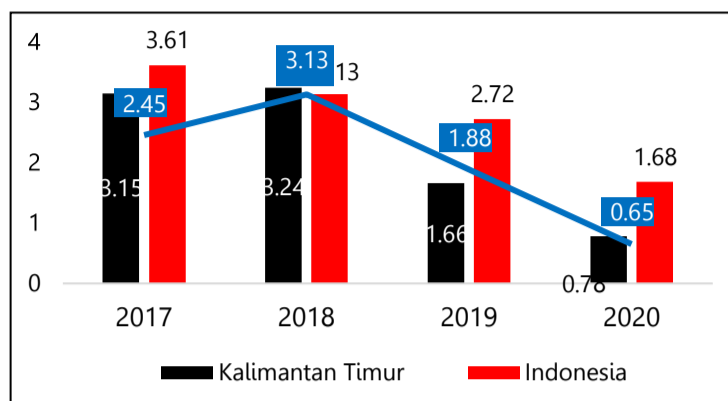
##### 2.1.2. Inflasi

Inflasi Kota Balikpapan mencatatkan angka sebesar 0,65% atau lebih rendah dibandingkan inflasi Provinsi Kalimantan Timur sebesar 0,78% dan nasional 1,68%. Dari sisi demand, umumnya pencapaian inflasi yang rendah dan stabil tersebut disebabkan karena berkurangnya konsumsi masyarakat selama pandemi Covid-19. Sedangkan dari sisi supply, terjaganya pasokan komoditas terutama bahan makanan turut menunjang kinerja inflasi.



Gambar 2.2.

**Inflasi Kota Balikpapan**



**Tabel 2. Nilai Inflasi Rata-Rata Kota Balikpapan Tahun 2017-2020**

Uraian	2017	2018	2019	2020
Inflasi Kota Balikpapan	2.45	3,13	1,88	0.65
Inflasi Provinsi Kaltim	3.15	3,24	1,66	0.78
Inflasi Nasional	3.61	3,13	2,72	1.68

Sumber : BPS, Balikpapan Dalam Angka Tahun 2021.

### 2.1.3. Produk Domestik Regional Bruto

PDRB merupakan sebuah indikator perekonomian yang menunjukkan suatu besaran atau nilai yang menggambarkan kemampuan atau potensi ekonomi dan kinerja ekonomi di daerah.

**Tabel 3. Produk Domestik Regional Bruto Kota Balikpapan Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Tahun 2016 – 2020 (Juta Rupiah)**

No.	Kategori / Lapangan Usaha	2016	2017	2018	2019	2020
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	786.498,80	817.009,20	921.182,21	1.011.777,43	1.008.217,23
2	Pertambangan dan Penggalian	40.216,78	41.391,41	44.390,45	47.863,51	50.198,40
3	Industri Pengolahan	38.123.497,45	41.311.647,89	46.413.113,23	49.431.361,51	48.984.642,43
4	Pengadaan Listrik dan Gas	69.093,51	77.940,62	83.681,69	91.957,52	99.042,78
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	63.199,81	72.812,13	76.626,30	82.261,96	88.513,35
6	Konstruksi	11.995.591,85	13.112.536,92	14.919.042,24	16.465.567,35	17.127.957,49
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	7.081.330,39	7.815.682,35	8.736.008,73	9.569.789,56	9.556.649,42
8	Transportasi dan Pergudangan	9.582.653,28	10.992.858,34	11.695.350,71	12.091.504,87	10.205.226,23
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1.418.791,99	1.605.053,02	1.835.785,78	2.031.892,78	1.872.245,03
10	Informasi dan Komunikasi	2.560.590,32	2.853.185,26	3.053.813,23	3.333.138,10	3.610.373,98
11	Jasa Keuangan	3.145.931,51	3.295.827,73	3.587.742,65	3.803.438,02	3.889.279,28
12	Real Estate	1.619.545,33	1.801.336,24	1.958.732,33	2.001.385,44	1.989.618,41
13	Jasa Perusahaan	254.897,46	276.232,44	296.775,21	310.513,77	303.684,68
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1.086.868,49	1.005.147,16	1.078.802,55	1.192.622,52	1.148.625,76
15	Jasa Pendidikan	1.239.650,49	1.373.532,99	1.576.612,98	1.717.693,52	1.913.183,22
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	521.696,33	567.235,77	616.432,19	661.526,33	852.559,93
17	Jasa Lainnya	611.865,93	697.099,33	805.291,37	925.486,67	900.138,05
<b>PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO</b>		<b>80.201.919,72</b>	<b>87.716.528,79</b>	<b>97.699.383,86</b>	<b>104.769.780,87</b>	<b>103.600.155,66</b>

Sumber : BPS, Balikpapan Dalam Angka Tahun 2021

Nilai PDRB Kota Balikpapan atas dasar harga berlaku tahun 2016 hingga 2019 mengalami tren peningkatan setiap tahunnya. Hingga pada tahun 2020, nilai ini mengalami penurunan menjadi 103,60 juta rupiah. Secara nominal, nilai PDRB ini mengalami penurunan sebesar 1,17 juta rupiah dibandingkan dengan tahun 2019 yang mencapai 104,77 juta rupiah. Penurunan nilai PDRB ini dipengaruhi oleh turunnya demand produksi sebagian besar lapangan usaha akibat pandemi Covid19. Peranan terbesar dalam pembentukan PDRB Balikpapan pada tahun 2020 dihasilkan oleh lapangan usaha Industri Pengolahan, yaitu mencapai 48 juta, selanjutnya lapangan usaha Konstruksi sebesar 17,12 juta, disusul oleh lapangan usaha Transportasi dan Pergudangan sebesar 10,20 juta, dan lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran serta Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 9,55 juta.

**Tabel 4. Produk Domestik Regional Bruto Kota Balikpapan Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha Tahun 2016-2020 (Juta Rupiah)**

No	Sektor	2016	2017	2018	2019	2020
1	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	700.989,75	693.061,54	745.962,47	780.094,57	750.317,42
2	Pertambangan dan Penggalian	35.052,10	35.262,92	35.529,86	35.934,21	35.326,73
3	Industri pengolahan	42.157.062,34	43.657.280,78	45.450.065,10	47.482.416,79	47.129.972,91
4	Pengadaan Listrik dan Gas	66.074,72	66.169,71	69.496,29	76.027,20	81.902,24
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	50.085,98	54.639,53	55.725,57	58.994,44	62.796,17
6	Konstruksi	8.665.558,76	8.943.483,43	9.510.131,46	10.281.792,05	10.685.554,10
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	5.848.553,56	6.155.721,31	6.561.791,70	6.946.740,64	6.907.783,53
8	Transportasi dan Pergudangan	5.618.657,51	5.978.044,83	6.277.041,97	6.308.754,17	5.551.428,71
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1.018.543,64	1.108.885,61	1.240.280,35	1.343.770,79	1.201.373,92
10	Informasi dan Komunikasi	2.449.620,40	2.644.528,85	2.780.444,93	2.974.061,27	3.199.783,36
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	2.399.325,61	2.394.776,19	2.517.790,53	2.612.608,15	2.670.178,53
12	Real Estate	1.261.177,47	1.321.553,37	1.382.661,68	1.410.669,50	1.398.220,18
13	Jasa Perusahaan	192.714,75	198.591,38	207.531,05	214.752,26	206.620,02
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	995.910,71	894.679,33	940.397,44	1.000.206,72	940.656,75
15	Jasa Pendidikan	942.006,30	1.008.511,95	1.087.881,84	1.137.683,76	1.195.361,44
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	361.390,33	385.003,42	409.277,58	431.695,63	537.249,81
17	Jasa Lainnya	458.738,15	491.884,98	535.098,89	582.565,49	543.364,84
<b>PDRB</b>		<b>73.221.462,06</b>	<b>76.032.079,12</b>	<b>79.807.108,74</b>	<b>83.678.767,65</b>	<b>83.097.890,66</b>

Sumber : BPS, Balikpapan Dalam Angka Tahun 2021

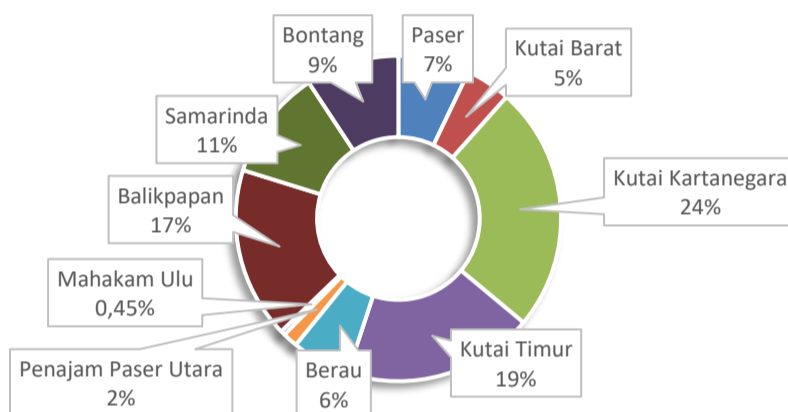
Selama kurun waktu 2016 hingga 2019, angka PDRB Kota Balikpapan mengalami peningkatan yang signifikan. Pada tahun 2016 angka PDRB sebesar Rp 73.221,46 Miliar menjadi Rp 83.678,77 pada tahun 2019. Namun pada tahun



2020, angka PDRB Kota Balikpapan mengalami penurunan menjadi Rp 83.097,89 Miliar. Kondisi ini dipengaruhi oleh produksi kinerja 10 lapangan usaha yang mengalami penurunan, termasuk lapangan usaha dominan yakni Industri Pengolahan dan Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor. Sedangkan, hanya 7 lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan positif, termasuk salah satunya lapangan usaha dominan yaitu Konstruksi. Secara keseluruhan PDRB ADHK Kota Balikpapan mengalami fluktuatif mengikuti siklus maintenance industri pengolahan minyak.

Gambar 2.3.

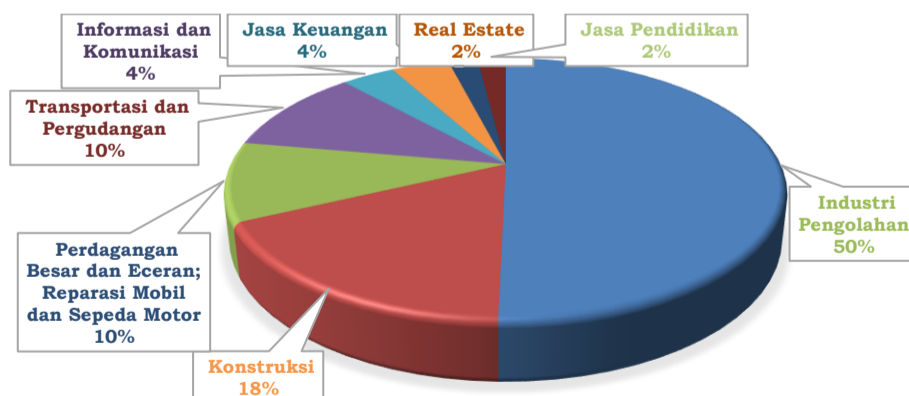
**Distribusi Kontribusi PDRB Kabupaten/Kota terhadap Provinsi Kalimantan Timur**



Jika dilihat berdasarkan kontribusi terhadap Perekonomian di Provinsi Kalimantan Timur, menunjukkan bahwa Kota Balikpapan berkontribusi 17% kepada perekonomian Provinsi Kalimantan Timur, terbesar ketiga setelah Kutai Kartanegara (24%) dan Kutai Timur (19%).

Gambar 2.4.

**Struktur Perekonomian Kota Balikpapan Tahun 2020**



Sumber : BPS, Balikpapan Dalam Angka Tahun 2021

Berdasarkan pada PDRB atas dasar harga berlaku dapat diketahui bahwa empat sektor yang berkontribusi terbesar pada perekonomian di Kota Balikpapan secara berturut-turut yaitu industri pengolahan sebesar 50%, konstruksi sebesar 18%, transportasi & pergudangan sebesar 10%, dan perdagangan sebesar 10%, sisanya sebesar 12% disumbang oleh lapangan usaha lainnya.

## 2.2. Proyeksi Kerangka Pendanaan

### 2.2.1. Pendapatan Asli Daerah

Peningkatan kemandirian daerah sangat erat kaitannya dengan kemampuan daerah dalam menghasilkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Semakin tinggi kemampuan daerah dalam menghasilkan PAD, maka semakin besar pula diskresi daerah untuk menggunakan PAD tersebut sesuai dengan aspirasi, kebutuhan, dan prioritas pembangunan daerah. Sejalan dengan kebutuhan pendanaan pembangunan daerah yang terus meningkat, intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan harus terus dilakukan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD), dengan tetap mengedepankan kebijakan untuk tidak membebani masyarakat.

**Tabel 4. Target Pendapatan Tahun 2021 dan 2022**

URAIAN (PP NO. 12/2019)	PROYEKSI/TARGET RAPBD RPJMD TA 2021-2022	
	TA 2021	TA 2022
<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>	<b>692.000.000.000,00</b>	<b>850.000.000.000,00</b>
Pajak Daerah	515.000.000.000,00	631.637.067.750,00
Retribusi Daerah	63.503.000.000,00	74.121.954.250,00
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	16.400.000.000,00	20.040.000.000,00
Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	97.097.000.000,00	124.200.978.000,00

Sumber: BP2DRD dan BPKD Kota Balikpapan Tahun 2020

Berdasarkan Tabel 4 menggambarkan kondisi pendapatan Pemerintah Kota Balikpapan dengan penjelasan sebagai berikut :

- Target Hasil Pajak Daerah tahun 2021 adalah sebesar Rp. 515.000.000.000,00. Pada tahun 2022 Pajak Daerah ditargetkan sebesar Rp. 631.637.067.750,00 atau Peningkatan kurang lebih sekitar 27%;
- Target Hasil Retribusi Daerah pada tahun 2021 adalah sebesar Rp. 63.503.000.000,00. Pada tahun 2022 Retribusi Daerah ditargetkan sebesar Rp. 74.121.954.250,00 atau Peningkatan kurang lebih sekitar 17%;
- Target Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan pada tahun 2021 adalah sebesar Rp. 16.400.000.000,00. Pada tahun 2022 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah ditargetkan sebesar Rp. 20.040.000.000,00 atau Peningkatan kurang lebih 22%;



- d) Target Lain – lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah pada tahun 2021 adalah sebesar Rp. 97.097.000.000,00. Pada tahun 2022 Lain – lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah ditargetkan sebesar Rp. 124.200.978.000,00 atau Peningkatan kurang lebih sekitar 28%.

### 2.2.2. Pendapatan Transfer

Pendapatan Transfer yang dimaksud adalah Pendapatan yang bersumber dari Pemerintah Pusat maupun pendapatan yang diperoleh atau ditransfer antar daerah. Komponen dari Pendapatan transfer terdiri dari Transfer Pemerintah pusat dan transfer antar Daerah, Transfer Pemerintah Pusat berupa Dana Perimbangan yang terdiri dari Dana Transfer Umum (Dana Bagi Hasil dan DAU) dan Dana Transfer Khusus (DAK Fisik dan DAK Non Fisik) dan Dana Insentif Daerah, sedangkan Transfer antar Daerah berupa Pendapatan Bagi hasil dan Bantuan Keuangan.

Penerimaan dari Pendapatan Transfer pada Tahun Anggaran 2021 ditargetkan sebesar Rp.1.482.652.180.000,00 dengan Proyeksi pada tahun 2022 adalah sebesar Rp.1.465.951.475.000,00 ditargetkan mengalami penurunan sekitar 1%. Adapun perincian target dari Pendapatan Transfer pada Tahun Anggaran 2021 dan Proyeksi Target pada tahun 2021 dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 5. Perincian Target Pendapatan Transfer Pemerintah Kota Balikpapan**

URAIAN (PP NO. 12/2019)	PROYEKSI/TARGET RAPBD RPJMD TA 2021-2022	
	TA 2021	TA 2022
<b>PENDAPATAN TRANSFER</b>	<b>1.482.652.180.000,00</b>	<b>1.465.951.475.000,00</b>
<b>Transfer Pemerintah Pusat</b>	<b>1.085.206.990.000,00</b>	<b>1.145.551.766.000,00</b>
Dana Perimbangan	1.000.995.174.000,00	1.111.528.054.000,00
Dana Insentif Daerah	84.211.816.000,00	34.023.712.000,00
<b>Transfer Antar-Daerah</b>	<b>397.445.190.000,00</b>	<b>320.399.709.000,00</b>
Pendapatan Bagi Hasil	268.545.190.000,00	320.399.709.000,00
Bantuan Keuangan	128.900.000.000,00	0,00

Sumber: BP2DRD dan BPKD Kota Balikpapan Tahun 2020

Berdasarkan tabel 5 menggambarkan kondisi pendapatan Pemerintah Kota Balikpapan dengan penjelasan sebagai berikut :

1. Target Transfer Pemerintah pusat pada tahun 2021 adalah sebesar Rp.1.085.206.990.000,00, Pada Tahun 2022 ditargetkan Rp.1.145.551.766.000,00 sehingga mengalami Peningkatan sekitar 6% dengan Rincian Sebagai Berikut :
  - a. Target Dana Perimbangan pada tahun 2021 setelah mengalami Pandemi Covid-19 adalah sebesar Rp.1.000.995.174.000,00, Pada Tahun 2022 ditargetkan Rp.1.111.528.054.000,00 sehingga mengalami Peningkatan sekitar 11%.

- b. Pada tahun 2021 Target Dana Insentif Daerah adalah sebesar Rp. 84.211.816.000,00, pada tahun 2022 ditargetkan menjadi sebesar Rp. 34.023.712.000,00 sehingga mengalami Penurunan sekitar 30%.
2. Transfer Antar Daerah pada tahun 2021 ditargetkan sebesar Rp.397.445.190.000,00, pada tahun 2022 ditargetkan mengalami penurunan sekitar 19% atau sebesar Rp.320.399.709.000,00 yang diperoleh dari :
- a. Target Pendapatan bagi hasil Pajak yang pada tahun 2021 sebesar Rp.268.545.190.000,00 pada tahun 2022 mengalami peningkatan sekitar Rp.320.399.709.000,00 atau sekitar 19%.
- b. Bantuan Keuangan pada Tahun 2021 sebesar Rp. 128.900.000.000,00, pada tahun 2022 belum ditargetkan karena masih menunggu konfirmasi dari kementerian terkait.

### 2.2.3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah

Pendapatan Pemerintah Kota Balikpapan yang bersumber dari Lain-lain Pendapatan yang Sah terdiri atas: (1) Pendapatan Hibah (2) Dana Darurat dan (3) Lain-lain pendapatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Penerimaan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah pada Tahun 2021 ditargetkan sebesar Rp.4.500.000.000,00 yang terdiri dari Pendapatan Hibah Rp. 4.500.000.000,00, Pada Tahun 2022 target Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah mengalami peningkatan sebesar Rp.107.397.257.000,00 yang diperoleh dari Pendapatan Hibah sebesar Rp.6.000.000.000,00 dan Lain-lain pendapatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan sebesar 101.397.257.000,00.

**Tabel 5. Target Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah Tahun 2020 dan Proyeksi Tahun 2021**

URAIAN (PP NO. 12/2019)	PROYEKSI/TARGET RAPBD RPJMD TA 2021-2022	
	TA 2021	TA 2022
<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH</b>	<b>4.500.000.000,00</b>	<b>107.397.257.000,00</b>
Pendapatan Hibah	4.500.000.000,00	6.000.000.000,00
Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	0,00	101.397.257.000,00

Sumber: BP2DRD dan BPKD Kota Balikpapan Tahun 2020



## 2.3 Sinkronisasi Kebijakan Pembangunan Tahun 2022

### 2.3.1. Arah Kebijakan Pembangunan Nasional Tahun 2022

Berdasarkan RPJMN Tahun 2020-2024, visi pembangunan nasional tahun 2020-2024 adalah “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”. Visi tersebut diwujudkan melalui 9 (sembilan) misi yang dikenal sebagai Nawacita Kedua, yaitu:

1. Peningkatan kualitas manusia Indonesia.
2. Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing.
3. Pembangunan yang merata dan berkeadilan.
4. Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan.
5. Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa.
6. Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya.
7. Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga.
8. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya.
9. Sinergi Pemerintah Daerah dalam kerangka Negara Kesatuan.

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi pembangunan nasional jangka menengah tersebut, ditetapkan tujuh Prioritas Nasional yaitu:

Gambar 2.5.

### Tujuh Prioritas Nasional



Penyusunan RKPD Tahun 2022 dilakukan dengan cara menyelaraskan tema, arah kebijakan, dan prioritas pembangunan nasional Tahun 2022 dengan prioritas pembangunan Daerah Tahun 2022, adapun Tema RKP Tahun 2022 adalah :

Gambar 2.6.

**Tema RKP Tahun 2022 Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural**



Berdasarkan Tema RKP Tahun 2022 tersebut, Fokus RKP tahun 2022 terbagi dalam 10 Major Project, yaitu Industri, Pariwisata, Ketahanan Pangan, UMKM, Infrastruktur, Transformasi Digital, Pembangunan Rendah Karbon, Reformasi Perlindungan Sosial, Reformasi Pendidikan dan Keterampilan serta Reformasi Kesehatan.

Gambar 2.7

**Fokus Pembangunan RKP Tahun 2022**



Pembangunan nasional dilaksanakan untuk mencapai sasaran pembangunan nasional di tahun 2022, antara lain meliputi:

Gambar 2.8

### Sasaran Pembangunan RKP Tahun 2022



### 2.3.2. Arah Kebijakan Pembangunan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022

Strategi dan Arah Kebijakan merupakan instrumen untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Perumusan Strategi dan Arah Kebijakan pembangunan diperlukan untuk memastikan kesesuaian antara intervensi pembangunan dengan permasalahan yang terjadi di daerah. Pemaparan Strategi dan Arah Kebijakan dalam RPJMD Provinsi Kalimantan Timur ini dibagi berdasarkan lima misi sebagai berikut :

**Tabel 4.4.**  
**Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023**

TUJUAN/SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
MISI 1. Berdaulat Dalam Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Berakhlak Mulia Terutama Perempuan, Pemuda Dan Penyandang Disabilitas		
Tujuan 1: Mewujudkan SDM yang berdaya saing, berkarakter dan berakhlak mulia		
Sasaran 1: Meningkatnya pemerataan taraf pendidikan masyarakat	S1. Peningkatan akses dan mutu pendidikan	1. Peningkatan kualitas layanan pendidikan vokasi/kejuruan selaras kebutuhan pasar kerja
		2. Mendorong pengembangan SMA/SMK Negeri Terpadu (Boarding School)
		3. Peningkatan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan, serta kemampuan pembelajaran berbasis IT
		4. Pemberian bantuan biaya pendidikan bagi masyarakat tidak mampu
		5. Peningkatan sarpras pendidikan dalam mendukung pembelajaran jarak jauh
		6. Pengembangan perpustakaan berbasis IT
Sasaran 2: Meningkatnya Peran Pemuda dalam Pembangunan	S2. Peningkatan daya saing generasi muda	7. Pengembangan kewirausahaan pemuda dan difabel berbasis IT
		8. Peningkatan kualitas pembinaan pemuda berprestasi di bidang olahraga
Sasaran 3: Meningkatnya pemerataan ketahanan kesehatan masyarakat	S3. Peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan	9. Pemerataan pelayanan tenaga kesehatan medis maupun non medis
		10. Peningkatan dan pemerataan pelayanan kesehatan dasar dan rujukan
		11. Peningkatan kualitas pengelolaan manajemen Fasyankes maupun fasilitasnya
		12. Penguatan fasilitas dan pelayanan kesehatan penanganan wabah penyakit menular
		13. Peningkatan kesadaran masyarakat terhadap pola hidup sehat



TUJUAN/SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Sasaran 4: Meningkatnya partisipasi aktif perempuan dalam pembangunan	S4. Optimalisasi pengarusutamaan gender	14. Penguatan dan pengembangan lembaga pemberdayaan perempuan
Tujuan 2: Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat		
Sasaran 5: Meningkatnya keberdayaan masyarakat perdesaan	S5. Pemerataan pembangunan wilayah perdesaan	15. Pembinaan dan pengembangan kemandirian desa 16. Penguatan kualitas perencanaan pembangunan desa yang berkelanjutan
Sasaran 6: Meningkatnya daya saing angkatan kerja	S6. Perluasan kesempatan kerja	17. Peningkatan pengembangan Kemitraan sertifikasi keahlian tenaga kerja 18. Peningkatan keterampilan angkatan kerja
MISI 2. Berdaulat Dalam Pemberdayaan Ekonomi Wilayah dan Ekonomi Kerakyatan yang Berkeadilan		
Tujuan 3: Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas		
Sasaran 7: Meningkatnya pendanaan pembangunan pemerintah	S7. Optimalisasi sumber-sumber pendapatan daerah	19. Peningkatan pendapatan, pelayanan dan pengawasan sumber-sumber penerimaan pajak daerah, retribusi daerah 20. Penambahan atas potensi penerimaan daerah yang bersumber dari usaha/ badan usaha yang beroperasi di Kalimantan Timur
Sasaran 8: Meningkatnya Nilai Ekspor Non Migas dan Batubara	S8. Peningkatan daya saing komoditas non migas dan batubara di pasar internasional	21. Penguatan dan pengembangan pasar produk unggulan daerah 22. Pengembangan UKM Berorientasi Ekspor 23. Peningkatan efisiensi pelayanan, pengamanan dan perlindungan ekspor
Sasaran 9: Meningkatnya kontribusi Sektor industri pengolahan Non Migas dan Batubara	S9. Pengembangan industri unggulan provinsi	24. Pengembangan kawasan industri prioritas provinsi 25. Pengembangan industri hulu agro, aneka dan pangan 26. Pengembangan sumber daya manusia pelaku IKM
Sasaran 10: Meningkatnya Peran Sektor Pertanian (dalam arti luas)	S10 Peningkatan produksi dan produktivitas komoditas sub sektor tanaman pangan dan hortikultura	27. Pengembangan kawasan pertanian tanaman pangan, hortikultura dan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B)
		28. Peningkatan prasarana pendukung produksi tanaman pangan dan hortikultura
	S11. Peningkatan Produksi Pangan Asal Ternak	29. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Keterampilan Petani Tanaman Pangan dan Hortikultura
		30. Peningkatan produksi ternak berkualitas
	S12. Peningkatan produksi dan nilai tambah komoditas sub sektor perkebunan secara berkelanjutan	31. Pengembangan Kawasan Peternakan
		32. Peningkatan produktivitas Komoditas unggulan perkebunan
		33. Pengembangan Komoditas Unggulan Perkebunan Non Sawit
		34. Peningkatan kemitraan antara petani swadaya dengan industri hilir
		35. Peningkatan nilai tambah dan stabilitas harga di tingkat petani
		36. Pengelolaan areal perkebunan yang bernilai konservasi tinggi
S13. Peningkatan produksi dan produktivitas komoditas sub sektor perikanan secara berkelanjutan	37. Peningkatan Kapasitas SDM Pelaku Usaha Bidang Perikanan	
	38. Peningkatan Sarana Prasarana Perbenihan dan Produksi Perikanan	
	39. Perlindungan dan pengelolaan zona konservasi kelautan dan perikanan	
S14. Peningkatan produksi dan produktifitas hasil hutan kayu dan non kayu yang berkelanjutan	40. Penguatan informasi potensi kawasan hutan	
	41. Pengelolaan dan pemanfaatan hasil hutan kayu dan non kayu	
	42. Perlindungan dan rehabilitasi kawasan hutan	
	43. Pemberian akses pengelolaan hutan kepada masyarakat di sekitar hutan	
Sasaran 11: Meningkatnya realisasi investasi sektor Non Migas dan non Batu Bara	S15. Peningkatan Ekosistem Investasi dan Kegiatan Berusaha Non migas dan non batubara	44. Penyediaan fasilitas/insentif daerah pada investasi industri non migas dan non batubara
		45. Peningkatan kualitas pelayanan terpadu pelaksanaan investasi berbasis elektronik
		46. Pemantauan komitmen perizinan
		47. Peningkatan pengawasan pelaksanaan perizinan penanaman Modal

TUJUAN/SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Sasaran 12: Meningkatnya usaha ekonomi koperasi dan UKM	S16. Revitalisasi pembinaan dan pengelolaan koperasi dan UKM	48. Peningkatan kapasitas kelembagaan koperasi dan UKM
		49. Pengembangan platform pasar koperasi dan UKM berbasis Digital
		50. Peningkatan kualitas produk koperasi dan UKM
		51. Fasilitasi permodalan koperasi dan UKM
Sasaran 13: Meningkatnya kontribusi sektor pariwisata dan ekonomi kreatif terhadap ekonomi daerah	S17. Pengembangan Produk Wisata Kalimantan Timur	52. Peningkatan layanan amenities produk wisata Kaltim
		53. Peningkatan layanan pemasaran produk wisata dan sub sektor ekonomi kreatif Kaltim
		54. Peningkatan kompetensi SDM pemangku produk wisata Kaltim
	S18. Pengembangan ekonomi kreatif	55. Implementasi peta jalan pengembangan sub sektor Ekonomi
		56. Penguatan daya saing produk sub Kreatif Kaltim
<b>MISI 3. Berdaulat Dalam Memenuhi Kebutuhan Infrastruktur Kewilayahan</b>		
<b>Tujuan 4: Meningkatkan Pemerataan dan Pengembangan Pelayanan Infrastruktur Dasar</b>		
Sasaran 14: Meningkatnya konektivitas dan pelayanan infrastruktur dasar yang menunjang perekonomian berbasis tata ruang/ kewilayahan.	S19. Peningkatan fungsi pelayanan infrastruktur dasar perhubungan	57. Peningkatan fungsi layanan dan keselamatan perhubungan
		58. Pembenahan manajemen transportasi, khususnya konektivitas antar moda transportasi
	S20. Penguatan konektivitas antar daerah, kawasan dan IKN	59. Pembangunan, Rekonstruksi dan pemeliharaan jalan
		60. Peningkatan sarana dan prasarana air baku
	S21. Peningkatan infrastruktur sumber daya air	61. Peningkatan sarana dan prasarana pengolahan serta jaringan distribusi air minum
		62. Penyelenggaraan SPAM Lintas Kabupaten/Kota (Regional)
	S22. Pembenahan infrastruktur kawasan kumuh	63. Penataan dan peningkatan kualitas permukiman kumuh
S23. Peningkatan infrastruktur pengendali banjir	64. Pembangunan dan pemeliharaan daerah aliran sungai (DAS) dan sub sistemnya	
Sasaran 14: Meningkatnya konektivitas dan pelayanan infrastruktur dasar yang menunjang perekonomian berbasis tata ruang/ kewilayahan.	S24. Peningkatan Akses ketenagalistrikan dan penggunaan energi berbasis potensi lokal	65. Peningkatan ketersediaan daya dan jaringan energi listrik serta Energi Baru Terbarukan (EBT)
		67. Penyesuaian tata ruang tingkat provinsi dan kabupaten/Kota yang selaras untuk mendukung IKN
	S25. Peningkatan kualitas penyelenggaraan penataan ruang	68. Menjadikan dokumen tata ruang sebagai rujukan dalam pemanfaatan ruang
		69. Peningkatan pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang.
<b>MISI 4. Berdaulat Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Berkelanjutan</b>		
<b>Tujuan 5: Meningkatkan kualitas lingkungan hidup</b>		
Sasaran 15: Menurunnya emisi Gas Rumah Kaca (GRK)	S26. Peningkatan kualitas pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan	70. Peningkatan Kualitas Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca dan Perubahan Iklim
		71. Peningkatan pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan pencemaran dan kerusakan lingkungan
Sasaran 16: Meningkatnya Ketangguhan Menghadapi Bencana	S27. Meningkatkan kapasitas daerah dalam mengurangi risiko bencana	72. Peningkatan kapasitas kelembagaan dan keterampilan masyarakat dalam pengurangan risiko bencana
		73. Peningkatan kualitas wilayah siaga bencana
<b>MISI 5. Berdaulat Dalam Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik</b>		
<b>Tujuan 6: Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang bersih, profesional dan berorientasi pelayanan publik</b>		
Sasaran 17: Terwujudnya Birokrasi yang memiliki pelayanan publik berkualitas	S28. Peningkatan kualitas pelayanan publik berbasis teknologi informasi	74. Optimalisasi peningkatan kualitas dan ketertiban dalam pengurusan administrasi publik
		75. Peningkatan dukungan pelayanan publik berbasis IT
		76. Pengembangan E-gov dengan dukungan jaringan dan pengolahan data yang handal dan aman
		77. Peningkatan kapasitas dan kinerja aparatur

TUJUAN/SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Sasaran 18: Terwujudnya Birokrasi yang efektif dan efisien	S29. Peningkatan Tata Kelola dan Kapasitas Pemerintah Daerah	78. Penguatan tata kelola kelembagaan dan sistem pemerintahan
Sasaran 19: Terwujudnya Birokrasi yang bersih dan akuntabel	S30. Peningkatan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah berbasis risiko	79. Peningkatan integritas dan komitmen pemerintah daerah dalam pengelolaan keuangan daerah

Arah kebijakan merupakan operasionalisasi dari strategi pembangunan dalam rangka mewujudkan Tujuan dan Sasaran RPJMD Provinsi Kalimantan Timur 2019-2023 dengan memperhatikan urutan waktu. Arah kebijakan juga menjadi instrumen untuk memetakan kebutuhan program dan kegiatan/sub kegiatan agar tetap dalam koridor untuk memecahkan berbagai akar permasalahan dan mengantisipasi isu strategis daerah. Di tingkat provinsi, di samping akan dioperasionalkan oleh perangkat daerah, arah kebijakan juga harus terintegrasi dengan arah kebijakan pembangunan kewilayahan di Kabupaten/Kota. Berikut merupakan Arah Kebijakan Pembangunan Kewilayahan Kota Balikpapan sesuai dengan Rancangan Akhir RPJMD Provinsi Kalimantan Timur :

**Tabel 4.5. Arah Kebijakan dan Fokus Pembangunan Kewilayahan Kota Balikpapan**

No	Arah Kebijakan Kewilayahan	Fokus Pembangunan Kewilayahan
1	Peningkatan produktivitas pertanian hortikultura	Intensifikasi dan pengamanan kawasan pertanian hortikultura
2	Peningkatan produktivitas perikanan tangkap dan budidaya	Penyediaan sarana dan prasarana perikanan tangkap dan budidaya
3	Pengembangan kawasan peternakan	Pengembangan Mini Ranch melalui pola kemitraan dan penyediaan sarana pendukungnya
4	Pemberian akses pengelolaan hutan kepada masyarakat sekitar hutan	Pengembangan kelompok usaha perhutanan sosial (KUPS)
5	Peningkatan pelayanan infrastruktur di kawasan pusat kegiatan ekonomi	Pengembangan jaringan jalan provinsi, Peningkatan Upaya pengendalian banjir, Pengembangan Direct Call Pelabuhan Kariangau, Perluasan infrastruktur air bersih, Peningkatan Kualitas Kawasan Kumuh
6	Pengembangan kawasan industri	Pengembangan Kawasan Industri Kariangau sebagai kawasan industri pengolahan multi produk
7	Peningkatan Pelayanan Kesehatan	Peningkatan akreditasi puskesmas

Penetapan indikator kinerja merupakan syarat mutlak untuk menetapkan rencana kinerja sebagai penjabaran dari rencana pembangunan tahunan daerah karena rencana kinerja merupakan gambaran maupun potret pembangunan Provinsi Kalimantan Timur di masa kini maupun yang akan datang.

Disamping itu, penetapan indikator kinerja daerah menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) daerah, dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir tahun



RPJMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018-2023. Berbagai indikator tersebut mengacu pada aspek-aspek pembangunan, sebagai berikut:

1. Aspek Kesejahteraan Masyarakat
  - a. Kesejahteraan dan pemerataan ekonomi
  - b. Kesejahteraan sosial
2. Aspek Pelayanan Umum
  - a. Pelayanan Urusan Wajib
  - b. Pelayanan Urusan Pilihan
  - c. Pelayanan urusan penunjang
3. Aspek Daya Saing Daerah
  - a. Kemampuan Ekonomi;
  - b. Fasilitas Wilayah/ Infrastruktur

Adapun Indikator Kinerja Utama (IKU) pemerintah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018-2023 adalah sebagai berikut:

**Tabel 4.6. Penetapan Indikator Kinerja Utama Provinsi Kalimantan Timur**

No	Indikator	Target Tahun ke-				
		1	2	3	4	5
1	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	75,30	75,43	75,56	75,76	76,87
2	Tingkat Kemiskinan (%)	6,00	5,94	5,87	5,78	5,70
3	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	3,5±1	3,5±1	3,5±1	3,5±1	3,5±1
	Laju Pertumbuhan Ekonomi non migas dan NonBatubara (%)	6±1	6±1	6±1	6±1	6±1
4	Indeks Gini	0,330	0,329	0,328	0,327	0,326
5	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	75.75	75.85	75.95	76.05	76.15
6	Indeks Persepsi Korupsi	5,50	5,60	6,65	6,69	7,45

### 2.3.3. Arah Kebijakan Pembangunan Kota Balikpapan Tahun 2022

Kota Balikpapan merupakan salah satu Kota yang mengalami dampak terparah pandemi Covid-19 untuk wilayah regional pulau Kalimantan maupun Provinsi Kalimantan Timur. Hal ini akan mempengaruhi pola intervensi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan terutama dalam penetapan prioritas untuk penanganan dampak pandemi Covid-19 khususnya perlambatan perekonomian. Pemerintah Kota harus melakukan percepatan pemulihan ekonomi, reformasi sosial dan pencegahan Covid-19 melalui rencana aksi yang selanjutnya akan menjadi prioritas pembangunan Kota Balikpapan Tahun 2022 yang dituangkan dalam tema pembangunan yaitu:

“PENGUATAN SISTEM KESEHATAN, REFORMASI BIROKRASI DAN INFRASTRUKTUR DALAM RANGKA Mendukung Pemulihan Ekonomi Masyarakat dan Reformasi Struktural”

Penentuan prioritas pembangunan harus mampu menyelesaikan permasalahan strategis kota. Adapun permasalahan strategis pembangunan Kota Balikpapan diuraikan sebagai berikut:

**Tabel 4.7. Permasalahan Strategis Pembangunan Kota Balikpapan**

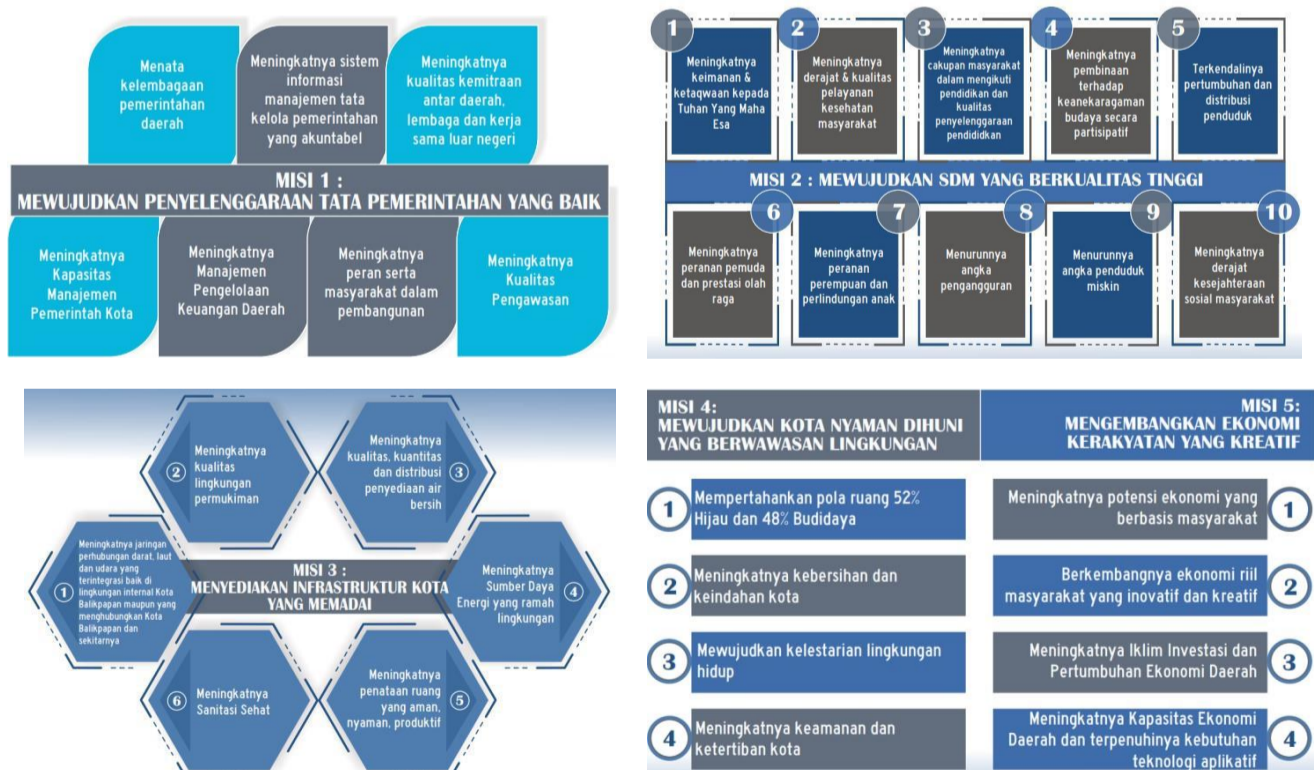
No	Urusan	Permasalahan
1	PENDIDIKAN	Peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga pendidik
		Pembangunan sarana dan prasarana pendidikan
2	KESEHATAN	Penanganan dan pencegahan COVID-19
		Konvergensi percepatan pencegahan Stunting
		Peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga kesehatan
		Pembangunan sarana dan prasarana kesehatan
3	PEKERJAAN UMUM	Adanya daerah yang tergenang/banjir
		Belum optimalnya layanan air minum
		Belum optimalnya pembangunan jalan untuk mendukung fungsi kawasan strategis
		Masih adanya ODF / BABS
		Belum optimalnya sarana gedung pemerintah
4	PERUMAHAN RAKYAT DANKAWASAN PERMUKIMAN	Belum terpenuhinya SPM Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman
		Belum optimalnya penanganan permukiman kumuh yang dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat
5	KETENTRAMAN, KETERTIBANUMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Adanya kendala dalam penegakan peraturan daerah
		Belum memadainya jumlah personel penegak peraturan daerah terhadap jumlah penduduk kota
		Kurangnya tingkat tanggap darurat dalam penanganan bencana dan kebakaran
6	SOSIAL	Belum adanya pusat rehabilitasi sosial terpadu
		Pendataan PMKS masih dilakukan secara manual
		Kondisi ekonomi sosial selama masa pandemi Covid 19 berdampak pada penurunan ekonomi masyarakat menengah ke bawah
7	KETENAGA KERJAAN	Masih tingginya TPT
8	PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	Peningkatan Jumlah Kasus Kekerasan Anak dan Perempuan
9	PANGAN	Belum adanya Regulasi Pangan Daerah
10	LINGKUNGAN HIDUP	Terbatasnya ketersediaan air baku
		Timbulan sampah di pesisir/laut
		Belum terkelolanya sampah B3 rumah tangga
		Pengupasan lahan yang tidak terkendali
11	PERTANAHAN	Adanya rasionalisasi akibat pandemi dan pembaharuan dokumen teknis pengadaan lahan
12	PENGENDALIAN DAN KELUARGA BERENCANA	Pertumbuhan penduduk yang terus meningkat
		Masih terdapatnya perkawinan pada usia anak/remaja di bawah 21 tahun
		Rendahnya presentase peserta KB aktif MKJP (Metode Kontrasepsi Jangka Panjang)
13	PERHUBUNGAN	Masih kurangnya sarana prasarana perhubungan

No	Urusan	Permasalahan
14	KOMUNIKASI DAN INFORMASI	Belum terintegrasinya sistem informasi layanan publik
15	KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH	Belum tersusunnya Data Terpadu Koperasi UMKM
16	PENANAMAN MODAL	Masih adanya regulasi daerah yang belum sinkron
17	KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	Pandemi Covid-19 mengakibatkan pengangguran pemuda meningkat Belum terselenggaranya pekan olahraga tingkat kota
18	KEBUDAYAAN	Registrasi Cagar Budaya
19	PERPUSTAKAAN	Meningkatkan minat baca masyarakat
20	KELAUTAN DAN PERIKANAN	Rendahnya produksi perikanan tangkap
21	PARIWISATA	Belum optimalnya kualitas destinasi pariwisata
22	PERTANIAN	Terdapat alih fungsi Lahan Baku Sawah seluas 99,81 Ha Produksi dan produktivitas tanaman perkebunan belum optimal Ketersediaan/jumlah populasi ternak terutama sapi betina belum memadai
23	PERDAGANGAN	Belum optimalnya pembangunan dan pemeliharaan sarana distribusi perdagangan
24	PERINDUSTRIAN	Pengembangan Sentra Industri Kecil dan Menengah (IKM) Masih Terhambat Oleh Keterbatasan Fasilitas dan Akses
25	KEUANGAN	Belum optimalnya pendapatan daerah

Berdasarkan hasil penelaahan permasalahan-permasalahan tersebut, maka Arah Kebijakan Pembangunan Kota Balikpapan tahun 2022, sebagai berikut:

Gambar 2.9

**Arah Kebijakan Pembangunan Kota Balikpapan Tahun 2022**





Program Prioritas Pembangunan Daerah merupakan program yang berhubungan langsung dengan kepentingan publik, bersifat monumental, berskala besar, dan memiliki kepentingan yang tinggi, memberikan dampak luas pada masyarakat dengan daya ungkit yang tinggi pada pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah.

Dengan 9 (sembilan) prioritas kepala daerah terpilih, maka program yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan Pencapaian Visi dan Misi adalah sebagai berikut :

Gambar 2.10

**Program dari 9 Prioritas Pembangunan Kepala Daerah Terpilih**



Gambar 2.11

**4 Prioritas Kota Balikpapan Tahun 2022**



Dari 9 Prioritas Pembangunan Kepala Daerah Terpilih, pada tahun 2022 di fokuskan kepada 4 (empat) Prioritas yang di kelompokkan berdasarkan tingkat urgensi / kepentingannya yang di jabarkan sebagai berikut :

# 1. Penguatan Sistem Kesehatan dan Pemerataan Akses Pendidikan

## • Penguatan Sistem Kesehatan

### 01 PENGELOLAAN JAMINAN KESEHATAN MASYARAKAT

Subsidi iuran BPJS bagi PBI dan Peserta Kelas III (PBPJ)

- PBPJ Kelas III yang didaftarkan Pemda (PBI/Gakin) = 17.637 Jiwa, Kebutuhan Anggaran Rp. 7,87 Miliar/Tahun
- PBPJ Kelas III peserta Aktif = 91.152 Jiwa, Kebutuhan Anggaran Rp. 41,34 Miliar/Tahun
- PBPJ Kelas III Peserta Tidak Aktif/Menunggak = 45.753 Jiwa, Kebutuhan Anggaran Rp. 20,75 Miliar/Tahun

Catatan:

- > Perlu ada pembeda antara PBI dan Kelas III (Non-PBI) yang akan dibiayai oleh Pemerintah Kota.
- > Terdapat PBPJ Kelas III Tidak Aktif (masih menunggak)
- > Untuk perlakuan terhadap Peserta yang menunggak perlu dilakukan verifikasi guna memutuskan apakah masyarakat yang menunggak akan dibantu pembayaran iuran BPJS atau dibantu pembayaran iuran setelah pelunasan tunggakan secara mandiri.

### 02 PEMBANGUNAN RUMAH SAKIT BESERTA SARANA DAN PRASARANA PENDUKUNGNYA

Pengembangan RSKB Sayang Ibu menjadi RSUD di wilayah Kecamatan Balikpapan Barat, dimana

- Rencana Lahan berada di Jl. Letjen Suprpto, Kelurahan Baru Ulu, Kecamatan Balikpapan Barat.
- Asset dimaksud telah diserahkan kepada Pemerintah Kota Balikpapan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.
- Kajian kelayakan Tahun 2020.
- Penyusunan Masterplan, DED, AMDAL, dan ANDALALIN dilaksanakan pada Tahun 2021.

### 03 PENYUSUNAN DOKUMEN RENCANA PEMBANGUNAN RUMAH SAKIT DI KECAMATAN BALIKPAPAN TIMUR

- Belum tersedia Layanan Kesehatan Rujukan/ Rumah Sakit di Wilayah Kecamatan Balikpapan Timur.
- Belum tersedianya Kajian Kelayakan Rencana Pembangunan RSUD di Wilayah Kecamatan Balikpapan Timur.

## • Pemerataan Akses Pendidikan

### 1 SUBSIDI UANG SEKOLAH (SPP)

bagi siswa di sekolah swasta (SD & SMP)

Memberikan Subsidi Uang Sekolah bagi siswa yang bersekolah di sekolah swasta sebesar:

**SD** opsi besaran subsidi Rp. 50.000 s.d Rp. 500.000  
 = 26.327 x 500.000 x 12 bulan = 157.962.000.000,  
 = 26.327 x 300.000 x 12 bulan = 94.777.200.000,  
 = 26.327 x 100.000 x 12 bulan = 31.592.400.000,  
 = 26.327 x 50.000 x 12 bulan = 15.796.200.000.

**SMP** opsi besaran subsidi Rp. 100.000 s.d Rp. 750.000  
 = 11.508 x 750.000 x 12 bulan = 103.572.000.000,  
 = 11.508 x 500.000 x 12 bulan = 69.048.000.000,  
 = 11.508 x 300.000 x 12 bulan = 41.428.800.000,  
 = 11.508 x 100.000 x 12 bulan = 13.809.600.000.

“Diasumsikan persentase daya serap Sekolah Swasta sebesar 25% dan daya tampung sekolah negeri 75%”

### 2 SUBSIDI UANG GEDUNG / PANGKAL

bagi siswa sekolah swasta kelas 1 SD dan kelas 7 SMP

Memberikan Subsidi Uang Gedung/Pangkal bagi siswa yang bersekolah di sekolah swasta, dengan rincian sebagai berikut:

**SD (Kelas 1)**

opsi besaran subsidi Rp. 500.000 & Rp. 750.000  
 = 6546 x 750.000 = 4.909.500.000,-  
 = 6546 x 500.000 = 3.273.000.000,-

**SMP (Kelas 7)**

opsi besaran subsidi Rp. 800.000 & Rp. 1.000.000  
 = 6.316 x 1.000.000 = 6.316.000.000,-  
 = 6.316 x 800.000 = 5.052.800.000,-

“Diasumsikan persentase daya serap pada kelas 1 SD dan kelas 7 SMP Sekolah Swasta sebesar 25% dan daya tampung sekolah negeri 75%”

### 3 PENGADAAN PERLENCAPAN SISWA

bagi siswa sekolah negeri & swasta (kelas 1 SD dan kelas 7 SMP)

**SD** = 25.411 x 3 set x Rp. 300.000,-  
 = Rp. 22.869.900.000,-

**SMP** = 24.238 x 3 set x Rp. 300.000,-  
 = Rp. 21.814.200.000,-

“3 set Seragam Sekolah: Putih Merah/Biru, Batik, Pramuka/ Olah Raga”

### 4 PEMBANGUNAN UNIT SEKOLAH BARU (USB)

1. Fokus pada lokasi/wilayah Kelurahan dengan cakupan layanan pendidikan yang masih rendah serta memiliki jumlah persebaran penduduk usia sekolah yang tinggi.
2. Diprioritaskan menggunakan lahan yang dikuasai pemerintah kota dan fasilitas umum yang telah dihibahkan kepada pemerintah kota atau tanpa melakukan kegiatan pembebasan lahan.

#### SD & SMP TERPADU SMPN KEC. BALIKPAPAN BARAT

<b>RENCANA LOKASI</b>	Fasum Balikpapan Regency	Pemukiman Atas Air Margasari (milik pemerintah kota)
<b>LUAS LAHAN</b>	15.027 m2	1,6 Ha
<b>KEL. KEC.</b>	Kel. Sepinggan Baru, Kec. Balikpapan Selatan	Kel. Baru Tengah, Kec. Balikpapan Barat

### 5 PENAMBAHAN RUANG KELAS BARU (RKB)

1. Berdasarkan analisa dan perhitungan kekurangan RKB untuk jenjang SD kekurangan sebanyak 64 RKB, sedangkan perhitungan kekurangan RKB untuk jenjang SMP kekurangan sebanyak 70 RKB.
2. Sebagai solusi jangka pendek, dan hanya dapat dilakukan pada sekolah yang masih memiliki lahan yang luas.

### 6 KEBUTUHAN TENAGA PENDIDIK

NO	JENJANG SEKOLAH	JUMLAH KEBUTUHAN GURU		JUMLAH	JUMLAH GURU		JUMLAH
		TERSEDIA	BELUM TERSEDIA		PNS	NON PNS	
I	SD Negeri	2.307	123	2.430	1.149	1.158	2.307
II	SMP Negeri	883	56	939	605	278	883
III	TK Negeri	10	20	30	9	1	10
IV	KESETARAAN (SKB)	99	111	175	68	31	99

- Formasi penerimaan PNS (khususnya guru) yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat tidak berimbang dengan kebutuhan guru di daerah.
- Pemenuhan kebutuhan PNS tetap sesuai dengan kuota dan formasi yang telah ditetapkan oleh Menpan RB.
- Perlu dilakukan upaya khusus dalam pengusulan formasi penerimaan PNS (Khususnya guru).

BKPSDM mengusulkan formasi PPPK untuk tenaga pendidik ke BKN dan MENPAN RB pada tahun 2021 sebanyak 559 orang, dengan

- Kebutuhan SDM untuk 1 Unit Sekolah Dasar sebanyak 30 Pendidik dan 4 Tenaga Kependidikan.
- Kebutuhan SDM untuk 1 Unit Sekolah Menengah Pertama sebanyak 47 Pendidik dan 8 Tenaga Kependidikan.

### 7 PENINGKATAN KUALITAS / PELAKSANAAN SERTIFIKASI TENAGA PENDIDIK SEKOLAH NEGERI DAN SWASTA

NO	JENJANG SEKOLAH	JUMLAH KEBUTUHAN GURU		JUMLAH	KUALITAS PENDIDIK YANG BERKUALIFIKASI S1/D-IV		JUMLAH
		TERSEDIA	BELUM TERSEDIA		S1/D-IV	BELUM S1/D-IV	
I	SD	3.310	215	3.524	3.104	206	3.310
II	SMP	1.679	181	1.860	1.629	50	1.679
III	TK / PAUD	1.232	80	1.312	894	338	1.232
IV	KESETARAAN	269	187	456	183	86	269



## 2. PENGENDALIAN BANJIR

Pengendalian Banjir dilakukan dengan mengendalikan penyebab dan memberikan solusi dari permasalahan, setelah diketahui penyebab dan permasalahan banjir, langkah langkah yang diambil dalam menangani permasalahan tersebut, berikut disajikan Penyebab, Permasalahan dan langkah langkah penanganannya :

Gambar 2.12

### Penyebab, Permasalahan dan Langkah-langkah Penanganannya



## 3. PEMENUHAN CAKUPAN LAYANAN AIR MINUM

Perlu upaya terus menerus untuk meningkatkan ketersediaan air baku di Kota Balikpapan, karena masih terdapat GAP antara data ketersediaan air baku dengan kebutuhan sir baku oleh masyarakat Kota Balikpapan. Grafik berikut menunjukkan ketersediaan air baku serta kebutuhannya pada tahun 2018-2021 dan proyeksinya pada tahun 2022-2026.

Gambar 2.13

### Ketersediaan Air Baku Serta Kebutuhannya Pada Tahun 2018-2021 Dan Proyeksinya Pada Tahun 2022-2026



Proyeksi ketersediaan air baku yang sama pada setiap tahunnya tidak berbanding lurus dengan kebutuhan yang meningkat setiap tahunnya. Oleh karena itu, beberapa upaya yang akan dilaksanakan untuk meningkatkan ketersediaan air baku di Kota Balikpapan adalah sebagai berikut :



Gambar 2.14

**Ketersediaan Air Baku di Kota Balikpapan**



**4. BALIKPAPAN KOTA KREATIF**

Beberapa isu dan permasalahan yang ada pada bidang Ekonomi Kreatif Kota Balikpapan adalah sebagai berikut:

Gambar 2.15

**Isu dan Permasalahan di Bidang Ekonomi Kreatif**



Langkah-langkah yang akan dilaksanakan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut antara lain:

1. Meningkatkan Pengelolaan Pariwisata Berkelanjutan & Industri Kreatif
2. Melibatkan aktor ABCGM (Aktor ABCGM yang dimaksud adalah Akademisi, Badan Usaha, Komunitas, Pemerintahan, dan Media).

Konsep integratif ini diterapkan melalui :

Gambar 2.16

**Konsep Penerapan Pelibatan Aktor ABCGM**



3. Mendorong Sub Sektor Prioritas yang mentrigger Ekonomi Berkelanjutan

Gambar 2.17

**Sub Sektor Prioritas Ekonomi di Kota Balikpapan**

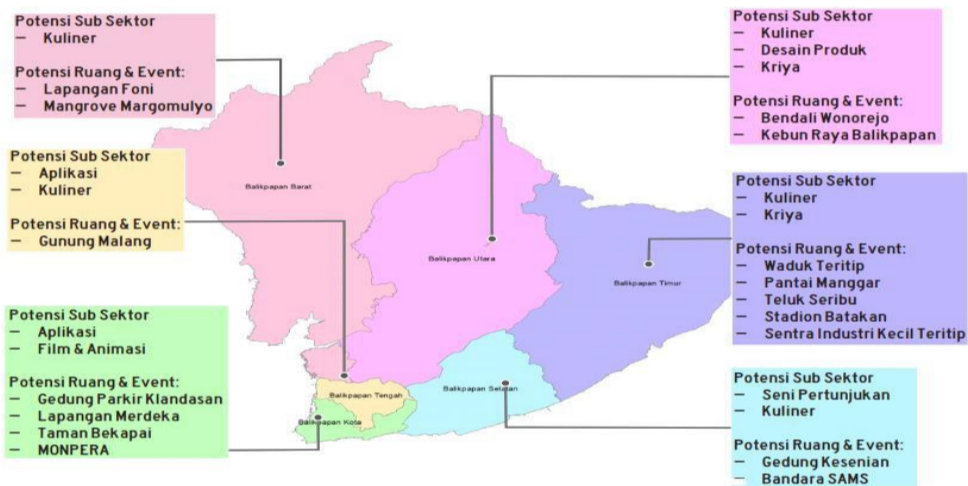


4. Mengembangkan Potensi Ruang Kreatif

Pengembangan potensi ruang kreatif berdasarkan potensi wilayah pada masing-masing Kecamatan yang ditunjukkan pada peta berikut :

Gambar 2.18

**Potensi Ruang Kreatif Berdasarkan Potensi Wilayah Per Kecamatan**



**Tabel 8. Keterkaitan Sasaran Pembangunan Daerah Tahun 2021-2026 dengan Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2022 serta Fokus Pembangunan Daerah Kota Balikpapan Tahun 2022**

SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2021-2026 (RPJPD 2005-2025)	PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2022	FOKUS PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2022
Memantapkan kondisi sosial dan budaya masyarakat yang bermoral, berbudaya, beretos kerja, berkemampuan ,sehat, dan cerdas berbasis pada nilai-nilai luhur bangsa dan agama dalam rangka pencapaian masyarakat yang sejahtera lahir dan batin	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	Pemerataan dan Perluasan Akses Kualitas Layanan Pendidikan seluruh Masyarakat
		Pemerataan dan Perluasan Akses Kualitas Layanan Kesehatan (penguatan Sistem Kesehatan yang inklusif)
		Penguatan Jaring Pengaman Sosial
		Perluasan Kemitraan dan Pelatihan Kerja
Pemantapan pencapaian kondisi infrastruktur kota yang memadai dan berkelanjutan sehingga dapat menunjang seluruh aktifitas masyarakat Kota Balikpapan dengan aman dan nyaman serta berorientasi pada lingkungan yang berkelanjutan.	Mewujudkan pemerataan infrastruktur yang berkualitas	Percepatan Penanganan Banjir dan Percepatan Pemenuhan Layanan Air Bersih

<b>SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2021-2026 (RPJPD 2005- 2025)</b>	<b>PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2022</b>	<b>FOKUS PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2022</b>
Memantapkan tata kelola untuk mewujudkan Balikpapan menjadi Kota layak Huni yang berwawasan lingkungan melalui sasaran pokok yang telah ditetapkan yang berorientasi pada lingkungan dan implementasi kebijakan yang pro lingkungan agar tercipta kenyamanan masyarakat.	Meningkatkan kualitas kota yang berwawasan lingkungan	Percepatan Perwujudan Kota Balikpapan sebagai Kota Sehat dan Nyaman yang Inklusif
mempertahankan dan memantapkan perekonomian daerah yang semakin kuat berbasis pada ekonomi kerakyatan, potensi sektor unggulan daerah berfokus pada perdagangan dan jasa, agribisnis, agroindustri, pariwisata, yang berdaya saing dengan memperhatikan kearifan lokal, serta cluster usaha tingkat kelurahan/pedesaan dalam rangka meningkatkan daya saing dan kemandirian daerah	Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal	Percepatan Pemulihan Ekonomi dengan pengembangan Ekonomi Kreatif dan Revitalisasi Perusda
mewujudkan pemerintahan yang bersendikan pada prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik, kapasitas daerah, dan jaringan kerjasama dalam rangka optimalisasi kinerja pelayanan publik dan peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam suasana politik yang demokratis berdasarkan padas emangat birokrasi, penegakan supremasi hukum dan HAM, daerah yang kondusif,aman,tertib dan tentram	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Penguatan kepercayaan Masyarakat terhadap Layanan Birokrasi Pemerintahan



## **BAB III**

### **KEBIJAKAN PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN DAERAH**

#### **3.1. Pendapatan Daerah**

Dengan melihat proyeksi asumsi makro ekonomi Kota Balikpapan Tahun 2021 dan berdasarkan hasil kajian Potensi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, serta melihat performa pendapatan daerah tahun 2020 yang mengalami penurunan sebesar 5% dari tahun 2019, oleh karena itu diperlukan beberapa upaya dan kebijakan untuk dapat mencapai Pendapatan Daerah yang lebih meningkat pada masa yang akan datang. Untuk itu, dirumuskan beberapa arah kebijakan Pendapatan Daerah yaitu sebagai berikut :

- a. Mengoptimalkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah melalui
  - Pembenahan Manajemen data Penerimaan pajak dan retribusi melalui evaluasi dan revisi secara berkala terhadap peraturan daerah pajak dan retribusi terutama yang mengangkut penyesuain tarif.
  - Pembenahan manajemen penerimaan PAD
  - Ektensifikasi dan intensifikasi pajak daerah terutama pajak yang memiliki potensi besar.
- b. Mengoptimalkan sumber pendapatan lain yang sah
- c. Mengoptimalkan kinerja Badan Usaha Milik Daerah yang sudah ada untuk memberikan kontribusi secara signifikan terhadap pendapatan daerah. Optimalisasi potensi pendapatan dari bagi hasil BUMD juga dilakukan melalui dana bergulir dan optimalisasi peran BUMD holding company.
- d. Mengoptimalkan sumber pendapatan dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi.
- e. Mengembangkan alternatif – alternatif pembiayaan pembangunan selain APBD, terutama melalui mekanisme Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) Corporate Social Responsibility (CSR).

Rekapitulasi pendapatan Pemerintah Kota Balikpapan yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan transfer dan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 6. Target dan Proyeksi Pendapatan Daerah Kota Balikpapan Tahun 2021 dan 2022**

KODE REK	URAIAN	PROYEKSI/TARGET RAPBD RPJMD TA 2021-2022	
		TA 2021	TA 2022
<b>4.</b>	<b>PENDAPATAN DAERAH</b>	<b>2.179.152.180.000,00</b>	<b>2.423.348.732.000,00</b>
<b>4.1.</b>	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>	<b>692.000.000.000,00</b>	<b>850.000.000.000,00</b>
4.1.1.	Pajak Daerah	515.000.000.000,00	631.637.067.750,00
4.1.2.	Retribusi Daerah	63.503.000.000,00	74.121.954.250,00
4.1.3.	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	16.400.000.000,00	20.040.000.000,00
4.1.4.	Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	97.097.000.000,00	124.200.978.000,00
<b>4.2</b>	<b>PENDAPATAN TRANSFER</b>	<b>1.482.652.180.000,00</b>	<b>1.465.951.475.000,00</b>
<b>4.2.1.</b>	<b>Transfer Pemerintah Pusat</b>	<b>1.085.206.990.000,00</b>	<b>1.145.551.766.000,00</b>
4.2.1.01.	Dana Perimbangan	1.000.995.174.000,00	1.111.528.054.000,00
4.2.1.01.01.	Dana Bagi Hasil	373.905.837.000,00	501.046.316.000,00
4.2.1.01.02.	Dana Alokasi Umum	442.478.095.000,00	428.306.693.000,00
4.2.1.01.03.	Dana Alokasi Khusus Fisik	67.709.691.000,00	68.651.156.000,00
4.2.1.01.04.	Dana Alokasi Khusus Non Fisik	116.901.551.000,00	113.523.889.000,00
4.2.1.02	Dana Insentif Daerah	84.211.816.000,00	34.023.712.000,00
<b>4.2.2.</b>	<b>Transfer Antar-Daerah</b>	<b>397.445.190.000,00</b>	<b>320.399.709.000,00</b>
4.2.2.01.	Pendapatan Bagi Hasil	268.545.190.000,00	320.399.709.000,00
4.2.2.02.	Bantuan Keuangan	128.900.000.000,00	0,00
<b>4.3</b>	<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH</b>	<b>4.500.000.000,00</b>	<b>107.397.527.000,00</b>
4.3.1	Pendapatan Hibah	4.500.000.000,00	6.000.000.000,00
4.3.3	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	0,00	101.397.257.000,00

Sumber: BP2DRD dan BPKD Kota Balikpapan Tahun 2020

### 3.2. Belanja Daerah

Arah Kebijakan Belanja Daerah digunakan untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan kota yang terdiri dari urusan wajib, urusan pilihan dan urusan yang penanganannya dalam bagian atau bidang tertentu yang dapat dilaksanakan bersama antara pemerintah dan pemerintah daerah atau antar pemerintah daerah yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Belanja daerah dikelompokkan ke dalam belanja tidak langsung dan belanja langsung. Dimana belanja tidak langsung merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Sementara belanja langsung merupakan belanja yang dianggarkan terkait langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan.

Belanja Daerah Kota Balikpapan pada Tahun 2022 disesuaikan dengan arah kebijakan nasional yaitu pemulihan ekonomi, reformasi sosial, dan pencegahan Covid-19 dengan tema pembangunan yaitu “Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural ” . Pemanfaatan belanja daerah harus dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien yang diarahkan pada tema pembangunan dengan menjaga proporsi belanja langsung lebih besar dari belanja tidak langsung. Selain itu pengelolaan belanja daerah didukung dengan sistem informasi yang terintegrasi meliputi perencanaan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan. Adapun untuk belanja pegawai tetap menerapkan sistem manajemen kinerja pegawai yang terintegrasi yang terintegrasi dengan kinerja instansi pemerintah daerah (LKjIP). Proyeksi belanja pegawai, barang dan jasa, serta belanja modal juga memperhatikan inflasi yang terjadi pada tahun 2020 sebesar 0,65% dan perkembangannya selama Covid-19.

**Tabel 7. Realisasi dan Proyeksi Belanja Daerah Kota Balikpapan Tahun 2021 dan Tahun 2022**

KODE REK	URAIAN	PROYEKSI/TARGET RAPBD RPJMD TA 2021-2022	
		TA 2021	TA 2022
<b>5.</b>	<b>BELANJA DAERAH</b>	<b>2.283.785.370.623,00</b>	<b>2.595.144.502.865,00</b>
<b>5.1.</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>1.827.574.312.467,00</b>	<b>1.974.077.110.888,00</b>
5.1.1	Belanja Pegawai	808.480.943.400,00	831.806.721.421,00
5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	885.776.348.467,00	999.757.679.939,00
5.1.4	Belanja Subsidi	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00
5.1.5	Belanja Hibah	131.857.020.600,00	141.512.709.528,00
5.1.6	Belanja Bantuan Sosial	460.000.000,00	0,00
<b>5.2.</b>	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>433.219.356.113,00</b>	<b>541.400.649.025,00</b>
5.2.1	Belanja Modal Tanah	41.512.587.084,00	81.531.452.700,00
5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	82.261.492.787,00	105.201.251.926,00
5.2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	67.297.113.541,00	129.588.954.565,00
5.2.4	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	229.286.724.101,00	210.013.410.563,00
5.2.5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	12.861.438.600,00	15.032.579.271,00
5.2.6	Belanja Modal Aset Lainnya	0,00	33.000.000,00
<b>5.3.</b>	<b>BELANJA TIDAK TERDUGA</b>	<b>22.991.702.043,00</b>	<b>79.666.742.952,00</b>
5.3.1.	Belanja Tidak Terduga	22.991.702.043,00	79.666.742.952,00

Sumber : BP2DRD dan BPKD Kota Balikpapan Tahun 2020



### **3.3. Pembiayaan Daerah**

Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Oleh karena itu fungsi penerimaan pembiayaan Daerah merupakan penerimaan untuk menutupi defisit anggaran.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

Demikian KUA Kota Balikpapan Tahun 2022 ini sebagai dasar penyusunan dan pembahasan PPAS.

Balikpapan, 27 Agustus 2021

**KETUA DPRD  
KOTA BALIKPAPAN,**



**ABDULLOH**

**WALI KOTA BALIKPAPAN,**



**RAHMAD MAS'UD**